

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Demokrasi internal partai merupakan hal yang esensial dalam mencapai suatu demokrasi di suatu negara, sebab Partai Politik merupakan lembaga infrastruktur negara yang berperan penting dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada negara. Namun, demokrasi tersebut menjadi sulit dicapai apabila Partai Politik sendiri gagal untuk menciptakan demokrasi internal partai. Selain itu, anggota merupakan pemegang kedaulatan lebih lagi dinyatakan melalui Pasal 15 ayat (1) UU Partai Politik yang memberikan hak bagi anggota untuk menentukan suatu kebijakan dan melalui Pasal 13 huruf e yang mendalilkan kewajiban Partai Politik untuk menyampaikan aspirasi anggota partainya. Mengacu pada kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021, yang mana menunjukkan adanya kegagalan Partai Politik untuk menyampaikan aspirasi anggotanya dalam pengambilan keputusan. Sehingga, sudah jelas bahwa anggota partai memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan Partai Politik.

Langkah yang diambil oleh Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung No.39/P HUM/2021, merupakan langkah yang kurang tepat sebab menelik pada kewenangan Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melakukan uji formil maupun materiil AD/ART Partai Politik. Sehingga, langkah yang seharusnya dilakukan oleh Para Pemohon adalah mengajukan gugatan ke PTUN untuk melakukan pembatalan terhadap Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat atau menggunakan upaya yang diatur dalam UU Partai Politik yakni dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

5.2 Saran

Atas kegagalan untuk menciptakan demokrasi internal partai dalam kasus yang terjadi di Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021, menunjukkan bahwa perlu diperbaikinya iklim internal Partai Politik di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan melalui upaya yang telah diambil oleh Para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan internal tersebut ke Mahkamah Partai, namun tidak menjadi jalan untuk ditegakkannya keadilan di internal partai. Selain itu, terhadap pengajuan permohonan AD/ART Parpol ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya dilakukan pemeriksaan mengenai Surat Bebas Perselisihan Internal Partai terlebih dahulu untuk mengurangi terjadinya penderogasian hak anggota partai di dalam Partai Politik.

Lebih dari itu, apabila terjadi kasus yang serupa sebaiknya anggota partai yang merasa dirugikan dapat melakukan penyelesaian permasalahan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 *jo.* 33 UU Partai Politik atau mengajukan gugatan ke PTUN.

AD/ART yang merupakan konstitusi bagi Partai Politik yang dalam proses pembentukannya haruslah mengacu kepada Perundang-undangan yang berlaku dalam pembentukannya. Namun, apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021, terdapat AD/ART yang telah disahkan namun pembentukannya tidak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, menjadi suatu urgensi untuk dibentuknya mekanisme baru untuk mengontrol pembentukan suatu AD/ART Partai Politik. Mekanisme kontrol atas AD/ART Partai Politik ini dapat berupa bentuk evaluasi terhadap AD/ART Partai sebelum disahkan yang sekiranya dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, suatu AD/ART Partai Politik terbentuk dengan dasar yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indrati, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 1 Edisi Revisi*. Yogyakarta : PT Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 2 Edisi Revisi*. Yogyakarta : PT Kanisius.
- Isharyanto. (2016). *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta : Penerbit WR.
- Kartika, I Gusti Ayu Putri. Et. All. *Buku Ajar Penalaran Argumentasi Hukum*. Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Labolo, Muhadam. Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II Edisi 2007. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Murid dan Kolega Bagir Manan. (2021). *Regulasi Yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi*, Bandung: Unpad Press.
- Rachman, Anwar. (2016). *Hukum perselisihan Partai Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Safa'at, Muchamad Ali. (2011). *Penafsiran Konstitusi*. Universitas Brawijaya.
- Simanjuntak, Enrico. (2023) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ; Transformasi & Refleks*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supriyadi, Ady. Fitriani Amalia. (2021). *Kedudukan Peraturan Menteri Di Tinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*,

UnizarLawReview, Vol. 4 Issue 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Suryana, H. Cecep. et. all. (2022) *Infrastruktur Politik Dalam Bingkai NKRI*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Susanti, Diah Imaningrum. (2015) *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*. Malang : IPHILS.

Tim Pengajar PIHK Fakultas Hukum UNPAR. (2020) *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Jurnal

Arifin, Firdaus. (2021) *Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, *Jurnal Litigasi*, Vol. 22 (1).

Anggono, Bayu Dwi. (2019) *Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Bagg, Samuel. Udit Bhatia. *Intra-Party Democracy: A Functionalist Account*

BJ, Grant. *The SAGE Encyclopedia of Political Behavior : Tokenism*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

Dzulqornain, Rizqo. Ridho Hadi Nurriszky. (2021) *Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung*, *Staatsrecht : Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1, No. 2. Yogyakarta : UIN Susunan Kalijaga Yogyakarta.

Efriza. (2019). *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik*, *Jurnal Politica* Vol. 10 No. 1.

- Fahmi, Khairul. (2010). *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3.
- Ghafur, Jamaludin. (2023). *Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 30.
- Juhaeni, Jojo. (2021). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosisologi Hukum*, Jurnal Konstituen Vol. 3 No. 1. Jatinangor : Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN.
- Latipulhayat, Atip. (2014). *Meluruskan Makna Demokrasi*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No.1, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Naibaho, Rinsofat. Indra Jaya M. Hasibuan. (2021). *Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakkan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*. Medan: Universitas HKBP Nommensen, Vol. 02.
- Permana, Tri Cahya Indra. (2016). *Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik secara Internal maupun Eksternal*. Jakarta : Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Pratiwi, Cekli Setya. Shinta Ayu Purnamawati. Et.all. *Penjelasan Hukum : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta : LeIP.
- Riza, Dola (2018). *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Bina Hukum Mulia: Soumatra Law Review Vol. 2, No. 2. Universitas Padjajaran.
- Riza, Dola. (2019). *Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang- Undang Administrasi Pemerintahan*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Rodriguez, Roberto Antonio Cabrera y. *A brief review of substantive democracy and some of its theories*.

Sari, Indah. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Satriawan, Hera Alvina. (2022) *Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 5 No. 1.

Sitorus, Syahrul. *Upaya hukum dalam perkara perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*

Yuhdi, Mohammad. (2016) *Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Maksigama Jurnal Hukum.

Zulfa M., et.all. *Demokrasi Indonesia*. Jawa Timur : Universitas Airlangga

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 ; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316)

Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021.

Internet

Fatmawati, Nurul. *Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>

Ghafur, Jamaludin. (2021) *Menguji AD/ART Parpol di Mahkamah Agung*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Departemen Hukum Tata Negara. <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/29/menguji-ad-art-parpol-di-mahkamah-agung/>

- Munawaroh, Nafiatul. (2022) *Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099/>
- Partai Demokrat. (2010) *Sejarah-Partai Demokrat*. Jakarta : DPP Partai Demokrat. <https://www.demokrat.or.id/sejarah-2/>
- Simanjuntak, Jonathan. (2021) *Yusril Gugat AD/ART Demokrat ke MA, Pakar Hukum: Secara Ketatanegaraan Mustahil*. <https://nasional.sindonews.com/read/556004/12/yusril-gugat-adart-demokrat-ke-ma-pakar-hukum-secara-ketatanegaraan-mustahil-1633043406>
- Soebroto, Arif Christiono. *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*. https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf
- Sutoyo. (2016) *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Makalah pada FGD yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI dan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang. Malang : Universitas Negeri Malang. http://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Konsep-Kedaulatan-Rakyat-dalam-Undang-Undang-Dasar-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-1945-Oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.-M.Hum_.pdf
- Wahyunadi, H. Yodi Martono, *Prosedur Beracara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara*. https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Prosedur%20Beracara%20Di%20Tingkat%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara.pdf
- Warlina, Lina. *Dasar-Dasar Analisis Kebijakan dan Teori Kebijakan*. Edisi 1. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5201-M1.pdf>

Lain-lain

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (2015) Sekretariat
DPP Partai Demokrat Direktorat Eksekutif.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (2020) Sekretariat
DPP Partai Demokrat Direktorat Eksekutif.

Hutajulu, Adrian. (1980) *Hakim sebagai Penemu dan Pembentuk Hukum*.